HARIAN UMUM
NusaBali

Anggaran ke Terminal Mengwi Distop Tahun 2016

• NUSABALI/YUDA

PEMKAB Badung akan menghentikan dana operasional Terminal Mengwi mulai tahun 2016, karena pengelolaan terminal tipe A dilakukan oleh pemerintah pusat. Tampak situasi Terminal Mengwi pada Minggu (14/6).

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung akan menghentikan suntikan dana operasional Terminal Mengwi saat nanti resmi diambil alih pemerintah pusat, terhitung tahun 2016. Sambil menunggu secara resmi pengambilalihan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) termasuk Bagian Aset sedang melakukan pendataan aset.

Aset Pemkab Badung bisa dihitung tanah seluas 12 hektare. Selain tanah, sejumlah fasilitas di dalamnya juga milik Pemkab Badung. Sementara bangunan merupakan bantuan pemerintah pusat.

Anggota Komisi II DPRD Badung Made Wijaya dan Wayan Suyasa ditemui di gedung dewan Selasa (16/6), men-

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 2

BARIAN UMUM NusaBali

sambungan . . .

gungkapkan, suntikan dana yang mencapai hampir Rp 2 miliar akan dihentikan tahun 2016 nanti. Sebetulnya, keinginan pemerintah menghentikan per Agustus, tapi karena pemerintah belum siap regulasi sehingga penghentian penyuntikan anggaran secara resmi per 2016 nanti.

"Keinginan pemerintah di sini sebetulnya per Agustus anggaran sudah distop. Tapi karena terbentur masalah kesiapan anggaran di pemerinth pusat, maka mulai tahun 2016 (angaran dari pemkab distop, *Red*)," ujar Wijaya.

Bila pemerintah nanti jadi menghentikan pasokan anggaran, diharapkan dapat dialihkan ke program kegiatan lainnya. "*Kan* bisa untuk alokasi di Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan, dan instansi lain yang membutuhkan," harap Wijaya diamini Suyasa.

Kabag Aset Pemkab Badung Wayan Puja secara terpisah mengatakan, sampai sekarang masih dalam status menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Jika sudah ada kepastian dari pemerintah pusat, maka pihaknya segera menyiapkan administrasi untuk ditindaklanjuti. "Kami sifatnya hanya menyiapkan dari segi pendataan aset saja. Sementara yang menangani itu adalah Dishubkominfo," ujar Puja.

Kepala Dishubkominfo Badung Wayan Weda Dharmaja mengungkapkan, sebelum resmi diambil alih oleh pusat, maka pihaknya masih mempunyai kewajiban untuk mengelola Terminal Mengwi. Pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengambilalihan pengelolaan Terminal Mengwi dari Badung ke pusat.

Mengenai operasional terminal, mantan Camat Abiansemal ini mengaku selama ini semua dibebankan ke Badung. Termasuk untuk gaji pegawai kontrak dan personel lain, sumber gajinya memakai APBD Badung. "Kalau dikelola pusat, otomatis gaji karyawan jadi urusan pusat. Kecuali yang berstatus PNS Badung," papar Weda.

Sekadar mengingatkan operasional Terminal Mengwi yang merupakan satu-satunya terminal tipe A di Bali, akhirnya bakal ditarik oleh pemerintah pusat. Pengambilalihan ini atas amanat UU 23/2014 tentang Pemerintaha Daerah. **as**

2

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Awasi Penggunaan Dana Desa, Dewan Rencanakan Sidak

BANGLI, NusaBali

Pihak DPRD Bangli kini tengah menggencarkan inspeksi mendadak (sidak) yang menyasar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten berhawa dingin itu. Sebab, belakangan gelontoran dana ke desa yang tergolong besar, dimana, per desa mendapatkan aliran dana dengan kisaran Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

"Kita sudah mempelajari soal ADD ini, begitu cukup bekal kita, maka akan lakukan sidak ke sejumlah desa," ujar Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, didampingi I Nyoman Gelgel Wisnawa, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/6).

Pihaknya menyasar penggunaan ADD, kata dia, karena memperoleh masukan dari masyarakat mengenai penggunaan ADD itu di desa. Makanya, sidak nanti akan diarahkan ke pemanfaatan ADD. "Intinya, kita sudah mengantongi hal mengenai penggunaan ADD tersebut,"ujar Carles.

Disinggung desa mana saja yang bakal disidak, Carles enggan membeberkanya. Begitu pula soal jadwalnya, pihaknya enggan memberikan bocoran. Namun yang jelas, dirinya bersama anggota dewan akan turun ke desa yang limpahan ADD cukup besar. "Kita ingin mengecek apakah penggunaan anggaran tersebut memang sudah sesuai aturan atau hanya akalan-akalan semata," ujar Carles.

Pihaknya ingin limpahan ADD ini benar-benar berdampak pada pembangunan desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita tidak ingin ADD besar, malah banyak masyarakat yang jatuh miskin," ujarnya.

Selain sidak pengunaan ADD, pihaknya juga bakal melakukan sidak ke kawasan Danau Batur. Dimana, akibat lemahnya penerapan aturan banyak pelanggar yang terjadi. Sebagai awalnya mereka telah minta ijin sama Jero Gede Batur. "Beliau sudah mempersilahkan kita untuk turun ke lapangan (Danau Batur)," ujarnya.

Sekadar tahu, dari ADD, Kabupaten Bangli akan mendapatkan kucuran dana total Rp 19,19 miliar. Sementara Bali pada 2015 mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp185,4 miliar lebih yang akan dibagikan kepada 634 desa di Pulau Dewata. Bali tepatnya akan mendapat dana desa sebesar Rp185.428.984.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 persen akan dibagi rata dengan keseluruhan desa penerima, sedangkan 10 persen sisanya berdasarkan variabel tertentu.

"Variabel yang dimaksud di antaranya berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan topografi. Dengan demikian, jika 90 persen dari Rp185,4 miliar itu dibagi 634, maka masing-masing desa di Bali akan mendapat sekitar Rp263,23 juta.

Selain ADD itu, bantuan kepada desa pakraman atau desa adat dan subak di Pulau Dewata juga tak kalah besarnya. ahun ini, setiap desa pakraman di Bali akan mendapatkan dana BKK dari Pemprov Bali sebesar Rp200 juta, sedangkan setiap subak (petani lahan sawah) dan subak abian (lahan kering) mendapatkan Rp50 juta. Yang akan mendapatkan BKK tersebut, total ada 1.488 desa pakraman dan lebih dari 2.700 subak. cr53

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Penyelewengan Anggaran Perdin

Lagi, Sekretaris DPRD Denpasar Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Untuk kedua kalinya, Sekretaris DPRD Kota Denpasar, IGN Rai Suta kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pada, Selasa (16/6) terkait dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar. Kali ini Rai Suta membawa tumpukan dokumen hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Denpasar tentang perjalanan dinas tahun 2013.

Pemeriksaan kedua Rai Suta ini sendiri dilakukan selama 3 jam mulai pukul 09.30 Wita hingga 12.30 Wita oleh jaksa penyidik Luga Herlianto. Informasi yang dihimpun, pemeriksaan Sekwan kali ini berkutat dengan hasil Bamus terkait perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar tahun 2013. Rai Suta menjelaskan jika perjalanan dinas anggota dewan ini dihasilkan melalui rapat Bamus.

Sementara Sekwan hanya menerima hasil dan menjalankannya. Soal ke mana dan siapa yang berangkat, serta rekanan atau travel mana yang akan menangani perdin tersebut, juga dihasilkan dari Bamus. "Setelah diputuskan, barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menindaklanjuti dengan melakukan penganggaran kegiatan Perdin," ujar sumber penyidik Kejari Denpasar.

Sementara itu, Kasi Intel Syahrir Sagir mengatakan pemeriksaan Rai Suta merupakan kelanjutan pemeriksaan sebelumnya yang sempat dilakukan pekan lalu. Dalam pemeriksaan kali ini, Rai Suta juga membawa dokumen terkait hasil Bamus DPRD Kota Denpasar tentang perjalanan dinas tahun 2013. "Tadi kami dalami juga pemeriksaan berkas-berkas tersebut," jelas Syahrir.

Ia mengatakan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan perjalanan dinas ini sudah mencapai 80 persen. Ketika ditanya apakah akan segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka, Syahrir enggan berkomentar. "Setelah pemeriksaan ini kami akan berkordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali. Untuk mendapatkan masukan terhadap perkembangan kasus ini," pungkasnya. **rez**

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Jalan Tol Soka–Seririt Akan Tembus Bukit

Jalan tol semula direncanakan enam ruas, tetapi tidak menutup kemungkinan bertambah menjadi tujuh ruas. Yakni penambahan ruas Soka Tabanan–Buleleng Timur

DENPASAR, NusaBali

Akibat terbentur persoalan pembebasan lahan, rencana pembangunan proyek Jalan Tol Soka Tabanan–Seririt Buleleng, Pemprov Bali mulai memikirkan membuka lahan alternatif. Caranya menembus bukit di Buleleng. Jalan terakhir ini akan ditempuh Pemprov Bali kalau upaya pembebasan lahan mentok.

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta di Denpasar, Selasa (16/6) sore, mengatakan bakal mengupayakan jalur tol Soka–Seririt terwujud bersama ruas jalan tol lainnya yang direncanakan. Kalau *toh* pembebasan lahannya susah karena harga lahan juga mahal, maka tidak ada jalan lain selain menyuntik bukit sebagai upaya membuka jalur.

"Di negara-negara maju seperti di China itu bukit *dibolongin*. Jalannya bagus bisa lurus, dan memperpendek jalur. Itu kami upayakan untuk mencari solusi terakhir kalau pembebasan lahan susah atau mentok. Kalau lewat perbukitan justru pembebasan lahannya gampang dan anggarannya lebih murah," ujar Sudikerta.

Pembangunan Jalan Tol Soka–Seririt terbagi dalam enam ruas. Yakni ruas I Kuta Sunset Road Badung–Canggu, ruas II Canggu Badung-Tanah Lot Tabanan, ruas III Tanah Lot Tabanan-Soka Tabanan, ruas IV Soka Tabanan–Pekutatan Jembrana, ruas V Pekutatan Jembrana–Seririt Buleleng, dan ruas VI Beringkit Mengwi Badung–Sakah Gianyar. Seluruhnya enam ruas tersebut panjang total mencapai 145 kilometer.

"Nah untuk jalur Seririt kalau pembebasan lahannya sulit bisa jalan terakhir menembus bukit. Tidak ada kelokan, lurus," tutur Sudikerta.

Sudikerta menyebutkan sekarang proyek senilai Rp 30 triliun lebih ini masih dalam tahap FS (feasibility study). Penggarapan FS-nya dilakukan PT Waskita Karya. FS yang direncanakan semula enam ruas tidak menutup kemungkinan bertambah menjadi tujuh ruas. Yakni penambahan ruas Soka Tabanan–Buleleng Timur. Tetapi lokasi pastinya Buleleng Timur di mana, semuanya masih dikaji dalam FS. "Nanti bisa berbentuk huruf Y yang menuju jalur Buleleng. Buleleng Barat satu ruas dan Buleleng Timur satu ruas. Kami di Pemprov Bali turut memberikan masukan-masukan. Termasuk masukan sebuah solusi membuka jalur menembus bukit. FS-nya masih dikerjakan. Mungkin akhir 2015 ini FS-nya sudah ada gambaran," kata Sudikerta.

Soal pembiayaan tidak ada perubahan? Kata Sudikerta biaya pembangunan Jalan Tol Soka–Seririt ini FS-nya menggunakan dana APBN. Sementara untuk pembangunannya yang diperkirakan menelan anggaran Rp 30 triliun akan melibatkan konsorsium. "Perkiraan dananya bisa melebih Rp 30 triliun, kalau ruas ke Buleleng Timur ditambah. Sekarang masyarakat harus mendukung program pembangunan tol ini. Supaya jalur- jalur perekonomian masyarakat bisa dibuka aksesnya," tandas Sudikerta.

Apalagi, menurut Sudikerta, pola pembangunan ruas tol ini nanti tidak akan dilakukan pembebasan lahan yang banyak. Karena akan dilakukan pola pembangunan dengan model jalan layang. Jalan tol ini akan dibangun menggunakan ruas jalan bertiang sehingga lahan tidak banyak beralih fungsi. Selain itu pemandangan dan bentang alam seperti persawahan tidak tersentuh pembangunan. Seperti di Beringkit Badung–Sakah Gianyar, sawah-sawah direncanakan tertata dan tidak beralih fungsi. "Kita bangun dengan pola jalan layang supaya tidak terjadi alih fungsi lahan," tegas pria asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ini. **nat**

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Lahan 220 SD Belum Bersertifikat

Pemkab Karangasem akui kesulitan menyertifikatkan lahan SD karena diserahkan tanpa disertai pipil dan masih atas nama desa setempat. Sehingga sempat jadi temuan BPK.

AMLAPURA, NusaBali

Setidaknya ada 220 lahan sekolah dasar (SD) di Karangasem yang hingga saat ini belum atau tanpa bersertifikat. Walau aset tersebut telah diserahkan Provinsi Bali, dan asetnya telah terdata, pihak Pemkab Karangasem mengaku kesulitan menyertifikatkan lahan SD.

Sebab, Provinsi Bali menyerahkan tanpa disertai pipil. Lahan tersebut masih atas nama desa setempat. Terutama sekolah-sekolah yang berdiri atas program Inpres (instruksi presiden). Sehingga jadi temuan BPK RI.

Kabag Perlengkapan Setdakab Karangasem I Nyoman Dani mengakui hal itu. Karena penyerahan aset tanpa disertai penyerahan pipil, sehingga sulit memproses sertifikat. Demikian dijelaskan di Amlapura, Selasa (16/6).

"Bagaimana kami menyertifikatkan, aset yang diserahkan tanpa disertai penyerahan pipil. Hanya diserahkan begitu saja, sedangkan tanah tersebut masih milik desa," katanya. Setelah dihitung sebanyak 220 sekolah SD lahannya bermasalah, dari 358 SD yang ada di Karangasem. Rata-rata SD yang berdiri itu, adalah program Inpres yang diawali tahun 1974.

Selama pendataan aset sekolah, katanya, seluruh Kasek SD se-Karangasem telah melaporkan asetnya. Juga tertuang dalam Dapodik (data pokok pendidikan). Jauh sebelumnya Pemkab Karangasem mengajukan penukar tanah perorangan ke Provinsi Bali.

Lahan yang diisi bangunan SD Inpres No 4 Pendem, Kelurahan/Kecamatan Karangasem, seluas 0,49 hektare dan SD Negeri 4 Penaban, Kelurahan Karangasem seluas 0,19 hektare, pengajuannya sesuai Surat Bupati Karangasem 13 Januari 1983 No 593.2/198/Umum dan No 593.3/199/Umum. Pengajuan itu mengacu Lembaran Daerah Provinsi Bali No 20 tahun 1983 dan SK Gubernur Bali No 593.33/2260/Perat tentang penukar tanah bukti dengan tanah milik perorangan. Sedangkan lahan SD lainnya belum diajukan sebagai penukar.

"Jadinya karena bermasalah menyertifikatkan lahan SD, yang bayar pajak adalah pemilik lahan itu. Karena dalam pipil termuat pemilik lahan perorangan," katanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdikpora Kecamatan Karangasem I Nyoman Merta mengakui, masih banyak lahan SD belum bersertifikat. "Ya itu tadi, karena Provinsi Bali menyerahkan aset tanpa pipil," katanya.

KUPT Disdikpora Kecamatan Selat I Gusti Ayu Gede juga mengakui, banyak lahan SD belum bersertifikat. "Masih banyak belum bersertifikat, hanya beberapa telah bersertifikat. Selam ini juga mengecek lahan-lahan mess yang statusnya hak guna pakai," kata I Gusti Ayu Gede.

Mengacu hasil temuan BPK tahun 2010 yang didapatkan, di antaranya: 1.445 aset tanpa perincian yang jelas senilai Rp 30,157 miliar, penggunaan aset yang masih digunakan pejabat yang telah purnabakti 189 unit senilai Rp 2,206 miliar.

Sedangkan aset yang tidak diketahui keberadaannya, di mana barangnya tidak ada, tetapi masih masuk neraca sebanyak 227.713 unit senilai Rp 24,577 miliar. Banyak juga aset yang tidak terdaftar ke dalam daftar catatan aset sebanyak 416 unit nilainya Rp 8,047 miliar. Aset yang diserahkan pemerintah ke masyarakat sebanyak 6.448 unit, nilainya Rp 7,304 miliar. k16

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

LPJ di Badung Banyak yang Sudah Uzur

• NUSABALI/YUDA

LAMPU penerang jalan rusak parah di Jalan Raya Uluwatu Kedonganan, Kuta Selatan, Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Sering padamnya lampu penerang jalan (LPJ) ternyata disebabkan LPJ banyak yang sudah uzur alias tua. Tak saja di Badung Selatan, kawasan Badung Utara juga kerap gelap gulita. Kondisi itu diakui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja.

"LPJ di Badung jumlahnya 13.131 titik yang tersebar di enam kecamatan. Tapi sebagian besar LPJ uzur karena dipasang sebelum tahun 2000," ungkap Weda, Selasa (16/6). Lampu yang dimaksud ada yang masuk kategori lampu ruas jalan dan lampu strategis.

Menurut Weda, LPJ yang dipasang mestinya berdasarkan standar yang disyaratkan PLN dan Peraturan ESDM, yakni umur sampai 15 tahun. Namun karena umur yang lawas, sehingga banyak LPJ padam. "Ada yang sejak pertama kali dipasang (sebelum tahun 2000) sampai sekarang belum pernah ada peremajaan, malah masih menggunakan lampu lama. Tak heran bila kadang lampunya sering padam," jelas Weda.

Yang bisa dilakukan saat ini, imbuhnya, Dishubkominfo sebatas melakukan perawatan saja. "Yang masih menyala kami rawat-rawat saja. Makanya kalau dilihat di lapangan banyak sambungannya," kata Weda.

Kapan akan dilakukan peremajaan? Weda menjelaskan, program peremajaan memang telah dirancang yakni pada tahun 2016. Rencananya seperempat dari total lampu yang akan diperbaiki termasuk tiang lampu bila ditemukan ada kerusakan. Sayangnya, tak dijelaskan seberapa banyak membutuhkan anggaran untuk peremajaan tersebut.

Berdasarkan kalkulasi awal, beber pejabat asal Sembung, Mengwi, satu LPJ bisa menghabiskan sekitar Rp 6 juta. Besaran itu terhitung dari lampu dan perbaikan tiang yang sudah uzur maupun rusak.

Selain dihadapkan dengan LPJ uzur, Weda juga mengaku LPJ di Badung Selatan lebih cepat padam dari Badung Utara. Hal itu karena naik turunnya daya listrik di daerah tersebut. "Yang jelas umur LPJ di Badung Selatan memang lebih pendek. Tiangnya dimakan korosi," tandasnya.

Weda menambahkan, selain kendala fasilitas yang sudah uzur, Dishubkominfo pun memiliki kendala dalam hal tenaga teknis di lapangan. Dari 13. 131 titik LPJ di Badung, untuk perawat ditangani oleh 15 orang. Terdiri dari 10 tenaga teknis dan 5 sopir. Sedangkan sarana dan prasarananya hanya mengandalkan 4 unit pickup buatan tahun 1993 dan 1996.

"Itu pun mereka kerjakan manual dengan memakai tangga. Jadi harap maklum saja," imbuh Weda. as

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Sidang Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Terdakwa Bantah Sebagai Pemilik UD Sumber Maju

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jembrana dengan terdakwa Made Sueca Antara yang merupakan anggota DPRD Jembrana dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (16/6). Kemarin sidang mengagendakan pemeriksaan mantan anak buah terdakwa bernama Asmuri. Menariknya, di akhir sidang terdakwa mengaku bukan pemilik UD Sumber Maju di mana Asmuri bekerja selama ini.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Silli, Asmuri mengaku bekerja di UD Sumber Maju sebagai salah satu staf yang bertugas membeli BBM.

Lalu pada 21 September 2013, Asmuri ditangkap polisi saat akan membeli BBM bersubsidi di salah satu SPBU. Saat ditangkap, Asmuri mengaku tidak membawa rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang dikeluarkan Disperindag Jembrana. Namun ia mengaku surat rekomendasi itu sudah dipegang petugas SPBU. "Saya biasa beli 216 liter. Pembelian ini sudah sekitar satu tahun saya jalani," jelasnya. Saat ditanya majelis hakim siapa pemilik UD Sumber Maju tempatnya bekerja, Asmuri langsung menunjuk terdakwa.

Namun, diakhir sidang, Sueca yang ditanya terkait keterangan Asmuri langsung membantahnya. Ia mengatakan bukan sebagai pemilik UD Sumber Maju dan tidak kenal dengan Asmuri. "Saya baru kenal setelah kasus ini ditangani polisi," ujar terdakwa yang tidak ditahan dalam kasus ini. Sidang sendiri akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Sueca asal Dusun Sebual, Desa Dangin Tukad Aya, Jembrana duduk di kursi pesakitan setelah didakwa melakukan penyimpangan dalam pembelian BBM bersubsidi melalui rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jembrana. Dugaan penyimpangan ini sendiri terjadi pada 2012 lalu.

Saat itu, Sueca yang merupakan pemilik UD Sumber Maju dengan status usaha kecil mengajukan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk industri pengolahan serabut kelapa miliknya.

Meski rekomendasi pembelian BBM tersebut seharusnya digunakan untuk usaha jenis mikro, namun Disperindag Jembrana melalui Kadis Perindag, Ni Made Ayu Ardini tetap mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi ini.

Berdasarkan rekomendasi itu, Sueca diberikan hak membeli solar bersubsidi 300 liter per hari.

• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA Made Sueca Antara (kiri) jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (16/6).

Dengan rekomendasi ini, Sueca sudah melakukan pembelian solar sebanyak 45.449,54 liter dengan total pembelian Rp 261 juta. Akibat perbuatan terdakwa, negara (Pertamina) dirugikan Rp 261 juta. Pasalnya, BBM tersebut harusnya untuk usaha mikro dan bukan usaha kecil seperti milik terdakwa. rez

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Sidang Dugaan Korupsi Raskin di Gianyar

Saksi Sebut Surat Pernyataan Warga Dipaksakan

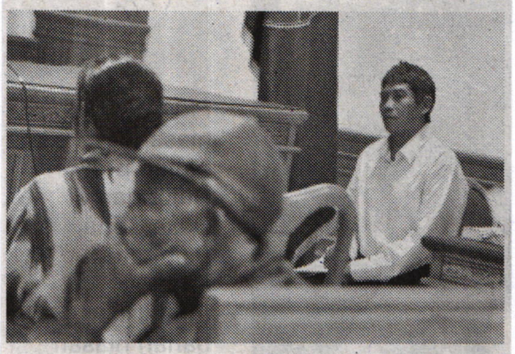

• NUSABALI/YUDA

SIDANG dugaan korupsi beras miskin dengan terdakwa AA Bagus Semaraputra, Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (16/6).

DENPASAR, NusaBali

Beberapa kejanggalan terungkap dalam sidang dugaan korupsi beras miskin (raskin) dengan terdakwa Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra,48, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (16/6). Di antaranya, surat pernyataan warga tidak menerima raskin yang ternyata dibuat atas paksaan penyidik kepolisian.

Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 saksi, yaitu I Made Pegeg dan Ni Made Rumes (warga) serta 4 kelian banjar di Desa Malinggih. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim Tipikor pimpinan Ahmad Peten Silli, ke empat kelian dinas di Desa Malinggih ini mengaku semua warganya menerima beras miskin yang dibagikan di Kantor Desa.

Pasalnya, setiap beras miskin ini datang selalu diinformasikan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Kaur Kesra. Keterangan mengejutkan dilontarkan para kelian dinas ini ketika ditanya soal surat pernyataan tidak menerima raskin yang dibuat oleh warganya. Kelian Banjar Payangan Desa, Nyoman Cindra mengaku pembuatan surat pernyataan tidak menerima raskin tersebut dibuat berdasarkan perkiraan saja.

Namun penyidik yang melakukan pendataan tersebut sudah membawa data terkait penerima raskin. "Jadi penyidik itu sudah bawa data penerima raskin. Data itulah yang ditanyakan kepada warga. Tapi karena warga tidak ingat jelas, mereka hanya bilang iya saja dan langsung disuruh tandatangan tidak menerima beras miskin," beber Cindra.

Di akhir sidang, kuasa hukum terdakwa, Wayan Mudita dkk langsung memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan penyidik kepolisian yang membuat BAP kasus ini. Pasalnya banyak keterangan saksi di BAP yang berbeda dengan keterangan di sidang. Selain itu, kehadiran penyidik kepolisian untuk mempertanyakan surat pernyataan tidak menerima raskin yang dibuat warga.

"Kami mohon majelis hakim menghadirkan penyidik," pinta Mudita. Majelis hakim sendiri masih akan mempertimbangkan permohonan kuasa hukum terdakwa dan akan kembali melanjutkan sidang pada pekan mendatang. rez

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015
Hal : 5